POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik

Politeia, 13 (2) (2021): 47-60

ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)

Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah

Fadhil Rizki Caesario*

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia, 15412

Submitted : 20 Oktober 2020 Revision : 20 November 2020 Accepted : 19 Juli 2021

Abstrak

Hingga saat ini Rusia masih menjadi salah satu negara terbesar di dunia, karena merupakan negara penerus dari Uni Soviet (USSR). Setiap kebijakan yang diambil oleh Rusia selalu menarik perhatian dunia internasional, tak terkecuali kebijakan Rusia untuk mengintervensi Suriah. Menurut KBBI intervensi ialah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya). Dalam hal ini Rusia mengintervensi Suriah, dengan ikut campur tangan antara konflik Rezim Baashar Al-Assad dengan pihak oposisi dimana Rusia mendukung Rezim Baashar Al-Assad. Dukungan yang dilakuan Rusia terhadap Suriah dalam konflik internal Suriah berupa dukungan militer dan non-militer yaitu berupa dukungan diplomatik. Dukungan militer yang dilakukan Rusia ialah kerjasama militer antara Rusia dan Suriah dalam konflik Suriah serta dukungan diplomatik dimana secara konsisten, Rusia sebagai salah satu dari lima anggota permanen DK PBB telah menggagalkan draft resolusi DK PBB terkait Suriah sebanyak empat kali dalam kurun waktu 2011-2015. Intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Suriah ini disebabkan karena kepentingan nasional Rusia, yang menyangkut kepada kepentingan pertahanan atau militer, ekonomi dan ideologi Rusia di Suriah. Hasil dari intervensi Rusia terhadap Suriah tersebut adalah berhasilnya Rusia dalam mempertahankan rezim pemerintahan Baashar Al-Assad dimana pihak opisisi hingga negara barat menginginkan Baashar Al-Assad mundur.

Kata Kunci: Intervensi, Kepentingan Nasional, Rusia, Konflik Suriah

Abstrak

Russia is still one of the largest countries in the world, because Russia is the successor country of Soviet Union (USSR). Every policy taken by Russia, always attracted the attention of the international community, including Russia's policy of intervention in Syria. According to KBBI, intervention is interference in a dispute between two parties (person, group, state, and so on). In this case Russia intervening between conflict of Baashar Al-Assad Regime with the opposition where Russia supported Baashar Al-Assad regime. The Russia's support for Syria in the internal conflict is by military and non-military support, there is diplomatic support. The military support provided by Russia is military cooperation between Russia and Syria in the Syrian conflict as well as diplomatic support where consistently, Russia as one of the five permanent members of the UNSC has foiled the draft UNSC resolution on Syria four times in the 2011-2015 period. This intervention due to Russia's national interests, which is defend of military, economic and ideological interests in Syria. The result of this intervention is Russia succeeded defend the government of Baashar Al-Assad regime, where the opposition until western countries wanted Baashar Al-Assad to resign.

***Password**: Intervention, national interests, Russia, Syirian conflict*

How to Cite: **Caesario, F, R. *(2020).*** Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik 13 (2) : 47-60.*

*Corresponding author:

E-mail: frcaesario@gmail.com

PENDAHULUAN

Rusia adalah negara terbesar di dunia yang membentang luas di dua benua yaitu benua Asia bagian Utara dan benua Eropa bagian Timur. Negara yang memiliki nama lengkap Federasi Rusia (Russian Federation) atau dalam bahasa Rusia yaitu *Rossiyskaya Federatsiya* ini memiliki luas wilayah sebesar 17.075.200 km^2 atau sekitar 2 kali lebih luas dibandingkan dengan Amerika Serikat dan sekitar 9 kali lebih luas apabila dibandingkan dengan Indonesia. Negara Rusia menggunakan sistem pemerintahan Federal Presidensial yang berarti kekuasaan berada penuh ditangan presiden, meskipun memiliki Perdana Menteri namun kekuasaannya hanya sebatas ranah domestik (Yunus, 2017). Negara yang terbentuk setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 ini merupakan negara bagian terbesar dengan penduduk terbanyak di Uni Soviet, yang kemudian melanjutkan status hukum sebagai penerus dari Uni Soviet. Hal inilah yang menyebabkan Rusia memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari segi kekuatan politik maupun kekuatan militernya, sehingga tidak heran jika Rusia terkadang masih mendapat sebutan sebagai salah satu Negara *Superpower*. Untuk itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Rusia, terutama dalam kebijakan luar negeri secara otomatis akan menarik perhatian dunia internasional. Salah satu kebijakan luar negeri Rusia yang menjadi perbincangan dan perdebatan di dunia internasional ialah keterlibatan Rusia di dalam konflik Suriah.

Suriah merupakan negara yang mengalami konflik berkepanjangan bahkan hingga saat ini. Konflik tersebut bermula pada tanggal 26 Januari 2011, yang dilatar belakangi oleh demonstrasi dan unjuk rasa masyarakat Suriah untuk menuntut Presiden Suriah, yaitu Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Suriah ini tidak dapat dilepaskan dari peristiwa *Arab Spring* yang terjadi sejak akhir tahun 2010, peristiwa ini dimulai dari Tunisia, merembet ke Mesir, lalu ke Libya, Bahrain, hingga Suriah. *Arab Spring* ialah peristiwa sebuah revolusi negara-negara Arab untuk menurunkan dan mejatuhkan rezim otoriter serta menciptakan sebuah sistem tatanan yang lebih demokratis,

sehingga tidak ada lagi rezim yang otoriter.

Meskipun telah terjadi demonstrasi dan unjuk rasa oleh masyarakat Suriah, namun Bashar Al-Assad tetap duduk di kursi pemerintahan, sehingga membuat demontrasi berubah menjadi sebuah pemberontakan massal secara nasional. Kemudian, hal ini memicu masyarakat melakukan gerakan reformasi dan memutuskan angkat senjata untuk menggulingkan Bashar Al-Assad dari kursi pemerintahan Suriah.

Jatuhnya ribuan korban dalam operasi militer di bawah perintah Bashar Al-Assad, menjadikan bukti bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM. Hal ini yang membuat pecahnya konflik bersenjata di Suriah. Pihak oposisi mengklaim bahwa pemerintahan Bashar Al-Assad telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Hal tersebut membuat pihak oposisi mendapat bantuan serta dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO lainnya. Mengetahui hal tersebut, Rusia tidak tinggal diam dan mendukung pemerintah Suriah. Sebab Rusia juga memiliki kepentingan tersendiri di Suriah, dimana apabila pihak oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat berhasil menggulingkan kekuasaan Bashar Al-Assad, maka Rusia akan kehilangan pengaruhnya karena sistem pemerintahan yang baru akan berada dibawah kendali Amerika Serikat dan mengancam kepentingan nasional Rusia di Suriah (Rachmat 2015).

Dengan adanya dukungan dari Rusia terhadap Suriah, Amerika Serikat tidak dapat mengeluarkan kebijakan untuk menginvasi Suriah melalui resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB karena Rusia dan China akan menggunakan hak vetonya sebagai anggota DK PBB untuk menolak kebijakan tersebut. Karena tidak dapat menginvasi secara langsung, maka Amerika Serikat menyuplai pihak oposisi dengan persenjataan. Mengetahui hal tersebut Rusia tidak tinggal diam dan terus meyuplai rudal dan persenjataan untuk pemerintah Suriah (Noor, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, isu ini sangat menarik untuk dibahas. Dalam jurnal ini penulis mengambil fokus terhadap bentuk intervensi militer dan diplomatik yang dilakukan Rusia

terhadap Suriah serta alasan mengapa Rusia sampai terlibat dan ikut campur dalam konflik Suriah, dan apa kepentingan Rusia terhadap konflik yang sedang terjadi di Suriah, hingga berusaha mempertahankan pemerintahan Bashar Al-Assad dari serangan pihak oposisi dan didukung oleh Amerika Serikat yang menginginkan Bashar Al-Assad mundur dari kursi kepresidenan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-diskursus. Tujuannya ialah untuk memahami *(to understand)* fenomena atau gejala sosial secara mendalam tentang intervensi Rusia dalam konflik Suriah dengan mengumpulkan data secara mendalam. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang tentang fenomena tersebut untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Metodologi penelitian kualitatif memiliki 4 (empat) tipe yaitu observasi, interview, dokumen, dan gambar visual yang masing-masing memiliki fungsi dan keterbatasan. Data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Data yang telah diperoleh kemudian diintrepretasikan oleh peneliti dengan berpegang pada Teori Realisme yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau.

Penelitian kualitatif adalah adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami massalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks yang disajikan melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti (Creswell, 2014).

Dengan metodologi tersebut penulis dapat menganalisis dan membahas lebih dalam mengenai sebab-sebab Rusia melakukan intervensi terhadap pemeritah Suriah serta bentuk intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Suriah yang sedang mengalami konflik internal. Teori yang dipakai dalam karya tulis ini adalah teori Realisme, dengan konsep utamanya yaitu kepentingan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menurut Hans J Morgenthou adalah kemampuan meminimun negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultural dari gangguan negara lainnya. Dari tinjauan tersebut maka pemimpin negara menentukan kebijakan spesifik terhadap negara lain, sehingga dengan kata lain 'kekuatan' merupakan yang merupakan pilar utama dalam bidang politik nasional maupun internasional yang realistis serta dipenuhi pertentangan untuk menanamkan pengaruhnya di suatu kawasan. Kepentingan nasional menjadi sangat berpengaruh bagi suatu negara untuk memnuhi kebutuhan politik, sosial, maupun ekonomi dan untuk pertahanan keamanan. Secara umum negara yang membawa kepentingan nasionalnya cenderung melakukan intervensi terhadap suatu kawasan. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antara lain yaitu Kedaulatan, Kemerdekaan, Keutuhan wilayah, Keamanan Militer, Kesejahteraan ekonomi, Kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian kepentingan nasional diatas, intervensi yang dilakukan oleh Rusia merupakan intervensi yang berdasarkan kepada kepentingan pertahanan atau militer, ekonomi dan ideologi Rusia di Suriah. Kepentingan pertahanan Rusia ialah mempertahankan pangkalan udara Rusia yang ada di Suriah. Dimana pangkalan udara tersebut merupakan pangkalan udara terakhir Rusia yang berada di luar negara Rusia. Sehingga sangat penting bagi Rusia untuk mempertahankannya karena sangat erat hubungannya dengan keamanan nasional Rusia. Sementara itu, kepentingan ekonomi Rusia yang berada di Suriah adalah adanya kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu kerjasama dalam perdagangan persenjataan Rusia dengan pemerintah Suriah, dimana Rusia mengekspor persenjataan kepada pihak pemerintah Suriah yang berkuasa. Selanjutnya ialah kepentingan ideologi Rusia yaitu untuk mempertahankan ideologinya yang ada di Suriah. Apabila pihak oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat menang, maka hal tersebut akan membuat kekuatan serta ideologi yang dimiliki Rusia akan menghilang

dan diganti dengan ideolgi atau paham yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Dukungan militer Rusia terhadap Suriah

Intervensi militer Rusia terhadap Suriah merupakan intervensi militer pertama yang dilakukan Rusia diluar negara bekas Uni Soviet. Rusia berusaha menyelamatkan rezim Bashar al Assad yang merupakan sekutu terakhirnya di Timur Tengah, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Rusia memiliki kemampuan yang terbukti untuk mempertahankan sekutunya serta menghormati komitmen aliansi yang telah dibentuk. Hal ini dibuktikan dengan dukungan militer yang dilakukan Rusia terhadap Suriah.

Intervensi militer Rusia mulai dilakukan pada 30 September 2015. Pesawat militer Rusia memulai serangan udara dengan menembakkan bom dan roket ke posisi militan bersenjata yang menentang rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun para pemimpin politik Rusia dan komandan militernya mengklaim bahwa serangan itu ditujukan untuk melawan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Secara umum, Rusia menyatakan intervensi militer mereka adalah 'memerangi terorisme', dengan analogi yang sama seperti perang melawan terorisme' yang dilakukan Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001. Menurut informasi pelacakan pesawat yang dilaporkan oleh pengamat Turki, hanya dua dari total 57 serangan tempur yang dilakukan oleh Pasukan angkatan udara Rusia hingga 7 Oktober 2015 melawan ISIS, sedangkan sisanya menargetkan kelompok oposisi kebanyakan berada di barat laut Suriah (Ilnicki, 2015).

Pada 22 Oktober 2015 Rusia mengklaim bahwa total 930 serangan udara telah dilakukan yang mengakibatkan 819 objek operasi yang digunakan oleh teroris telah dihancurkan. Namun, sebagian besar serangan tersebut bukan ditujukan kepada ISIS, tetapi terhadap kelompok oposisi bersenjata dan fasilitasnya. Menurut analis Thomson Reuters, sebuah kantor berita yang bermarkas di London, Inggris hampir 80%

serangan udara ditujukan bukan terhadap ISIS, tetapi terhadap kelompok oposisi lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka kebetulan memfasilitasi kesuksesan ISIS. Misalnya, serangan udara Rusia terhadap para militan dan pemberontak yang mengepung kota terbesar kedua di Suriah, Aleppo, mengakibatkan mereka menyerah dalam pengepungan dan menarik diri dari daerah utara dan barat laut Aleppo pada tanggal 15-18 Oktober dengan maksud untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Posisi mereka diambil alih oleh militan ISIS, yang dengan demikian memperoleh keuntungan teritorial baru di barat laut Suriah (Thomson Reuters, 2015).

Tidak hanya melakukan serangan udara, Rusia juga melakukan serangan yang dilakukan oleh angkatan lautnya dengan menggunakan rudal yang diluncurkan dari kapal perang pada 7 Oktober, setidaknya 26 roket manuver ditembakkan ke 11 sasaran di Suriah. Rudal yang ditembakkan Rusia adalah bom roket bersayap dengan nama '*Kalibr*', serta memiliki jarak yang ditempuh sekitar 1500 km.

Penggunaan rudal roket '*Kalibr*' yang digunakan oleh Rusia disebabkkan karena rudal tersebut belum dilarang di bawah Perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang Penghapusan Rudal Jarak Menengah dan Jarak Pendek, ditandatangani pada 8 Desember 1987, karena diklasifikasikan sebagai rudal berbasis laut. Dengan penggunaan militer yang dilakukan Rusia dalm mendukung pemerintahan Baashar Al-Assad menunjukkan bahwa Rusa sangat serius dalam mempertahankan rezim pemerintahan ini. Selain itu peggunaan militer juga dilakukan sebagai bentuk kerjasama militer antara pemerintahan Rusia dan Suriah.

Dukungan Diplomatik Rusia terhadap Suriah

Dukungan yang dilakukan Rusia terhadap Suriah dalam konflik internal Suriah tidak hanya berupa militer, melainkan juga dukungan diplomatik. Dukungan diplomatik yang dilakukan Rusia ialah veto terhadap *draft* resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang ditujukan kepada pemerintah Suriah dan dukungan ekonomi berupa

pinjaman uang dan layanan perbankan Rusia terhadap pemerintah Suriah.

Konflik Suriah yang pecah sejak tahun 2011 lalu menimbulkan banyak korban serta jumlah korban terus mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh seringnya penggunaan kekerasan oleh Presiden Assad dalam meredam massa. Dengan pertimbangan konflik yang tidak kunjung mereda, PBB sebagai organisasi internasional turut memasukkan konflik Suriah dalam agenda pembahasan sidang Security Council. Rusia sebagai teman lama Suriah memiliki pandangan yang berbeda mengenai konflik tersebut bahkan banyak pihak yang sudah menduga bahwa Rusia melindungi rezim Bashar Al Assad.

Pada 4 Oktober 2011 Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang membahas konflik Suriah. Draft resolusi PBB S/2011/612 yang berisi pemberlakuan sanksi pada pemerintah Suriah, perintah pemberhentian penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dan melaksanakan kebebasan berpendapat, namun mendapat penolakan oleh Rusia dan China melalui penggunaan hak vetonya (UN Security Council, 2011). . Menurut Rusia, draft resolusi yang disponsori oleh Prancis, Jerman, Portugal dan Inggris tersebut bukan merupakan pendekatan politik yang tepat dalam mengakhiri sebuah konflik. Rusia secara tegas menolak intervensi militer yang menurutnya telah dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan sebagai salah satu model action masa depan dalam melakukan intervensi dengan melibatkan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* di dalamnya seperti halnya yang terjadi di Libya.

Pada 4 Februari 2012 Dewan Keamanan PBB kembali mengadopsi draft resolution terkait konflik Suriah. Sidang ini dilatarbelakangi terjadinya penyerangan oleh pemerintah Suriah terhadap pangkalan militer dan tentara oposisi yang terletak di pusat Suriah, Kota Homs. Draft resolusi S/2012/77 yang mendukung outline proposal Liga Arab tersebut meminta kedua belah pihak baik pemerintah Suriah dan kelompok oposisi militer untuk menghentikan semua kekerasan dan pembalasan serta mengakhirinya

dengan negosiasi. Dalam text tersebut pemerintah Suriah diminta untuk menghentikan semua kekerasan dan wajib melindungi warga sipilnya, membebaskan semua orang yang ditahan, menarik kekuatan militer dan menjamin hak kebebasan termasuk memperbolehkan aksi demonstrasi (UN Security Council, 2012). Selain itu draft resolusi Liga Arab tersebut menghimbau agar Suriah melakukan transformasi politik menuju sistem demokrasi serta melakukan pergantian pemimpin melalui pemilihan umum. Namun reselousi tersebut kembali gagal karena Rusia dan China menggunakan hak vetonya untuk yang kedua kalinya memskipun 13 negara yang lain mendukung draft resolusi tersebut.

Rusia berpendapat bahwa kekerasan dan tumpah darah harus segera dihentikan dan Rusia mengambil langkah dengan mengirimkan representatif resmi untuk bertemu Presiden Bashar Al-Assad pada 7 Februari 2012. Meski begitu, negara-negara besar lain memandang bahwa upaya perdamaian dengan mengadvokasi perubahan rezim yang diusahakann Rusia tersebut tidak akan berhasil.

Dalam sidang Dewan Keamanan yang diadakan tanggal 19 Juli 2012 tersebut, Rusia dan China kembali menolak draft resolusi yang diajukan oleh Inggris sementara dua negara, Afrika Selatan dan Pakistan memilih abstain. Penggunaan hak veto Rusia ini adalah ketiga kalinya dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir sejak konflik Suriah. Kegagalan dalam mengadopsi draft resolusi S/2012/538 menandakan tidak berhasilnya Dewan Keamanan memperpanjangan mandat *United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS)* dan menjatuhkan sanksi pada Suriah (UN Security Council, 2012). Bagi Rusia, draft resolusi tersebut sudah tentu akan ditolaknya karena Rusia menilai bahwa maksud draft resolusi tersebut akan membuka jalan selanjutnya ke intervensi militer di masa yang akan datang.

Dengan masih berlangsungnya konflik Suriah, Pransis berusaha mensponsori draft resolusi untuk konflik Suriah namun kembali

mengalami kegagalan. Meskipun ebenarnya Draft S/2014/348 yang diusung oleh Prancis telah mendapatkan dukungan dari 13 negara anggota Dewan Keamanan, namun Rusia dan China menolak draft resolusi tersebut. Sehingga sidang yang dilakukan Dewan Keamanan pada tanggal 22 Mei 2014 gagal mengesahkan draft resolusi karena penggunaan hak veto Rusia dan China. Seperti halnya rutinitas yang dilakukan berulang kali, Rusia dan China kembali memveto draft resolusi sehingga PBB tidak dapat bertindak banyak dalam konflik Suriah. Draft tersebut berisi penyerahan konflik Suriah pada *International Criminal Court (ICC)* mengingat konflik Suriah yang terus berlanjut dan makin banyak korban bahkan termasuk warga sipil. ICC tidak dapat melakukan investigasi terhadap konflik Suriah tanpa persetujuan ke-15 negara anggota Dewan Keamanan.

Penolakan Rusia terhadap draft resolusi konflik Suriah untuk kali keempatnya mendapat banyak kecaman oleh negara-negara Barat. Rusia memandang bahwa penyelesaian terbaik konflik Suriah adalah melalui upaya perdamaian secara politik, melimpahkan konflik pada ICC hanya akan memperumit dan melukai upaya perdamaian yang dilakukan. Melalui penggunaan empat kali hak vetonya dan pemberian bantuan kepada Suriah seakan menegaskan posisi Rusia yang berdiri bersama aliansinya di Timur Tengah yaitu Suriah. Bagi Rusia, pemerintahan yang legal di Suriah masih berada di tangan Bashar Al-Assad, jadi upaya apapun akan dilakukan oleh Rusia untuk mendukung Bashar dalam mempertahankan rezimnya.

Secara konsisten, Rusia sebagai salah satu dari lima anggota permanen DK PBB telah menggagalkan *draft* resolusi DK PBB terkait Suriah sebanyak empat kali dalam kurun waktu 2011 sampai 2015. Dalam setiap penggunaan hak vetonya, Rusia memiliki alasan dan perspektif tersendiri dalam melihat konflik Suriah. Kremlin memandang bahwa penyelesaian terbaik konflik Suriah adalah melalui upaya perdamaian secara politik, bukan melimpahkan konflik pada organisasi internasional.

Bukan hanya melalui jalur diplomatik, Rusia juga menyalurkan bantuan ekonomi kepada pemerintah Suriah berupa pinjaman uang dan beberapa bantuan ekonomi lainnya.

Posisi Strategis Rusia di Timur Tengah

Timur Tengah sebagai kawasan pertempuran pengaruh berbagai negara besar membuat Rusia ikut andil di dalamnya. Keterlibatan Rusia di Timur Tengah khususnya konflik Suriah disebut-sebut dilatarbelakangi adanya motiv pada level global dan mencapai balance of power. Amerika Serikat yang telah menjadi pemeran utama selama bertahun-tahun di kawasan tersebut menimbulkan gelora persaingan untuk Rusia, tak jarang ada yang menyebut bahwa konflik Suriah menjadi cerminan belum berakhirnya perang dingin, persaingan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara aliansinya.

Pada masa pemerintahan Barrack Obama kebijakan luar negeri Amerika cenderung berbeda pada pada presiden sebelumnya sehingga membuat peluang tersendiri bagi kebangkitan Rusia. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selamana ini telah memusatkan perhatiannya pada Timur Tengah menjadi bergeser ke wilayah Asia, sehingga kebijakan ini dikenal sebagai *"pivot to Asia"*. Citra pemimpin duo rivalitas Perang Dingin tersebut jauh berbeda, Vladimir Putin yang dipotretkan sebagai pemimpin tegas dan kuat, tertarik untuk memperluas ekspansi pengaruh Rusia ke berbagai wilayah termasuk Timur Tengah.

Beberapa analisis juga menyatakan bahwa langkah Putin mengambil kebijakan untuk menurunkan pasukannya di Timur Tengah karena Putin ingin menaikkan kembali nama Rusia di kancah internasional serta mengisi kekosongan di Timur Tengah yang ditinggal selama era Presiden Obama. Selain itu penerjunan militer Rusia dalam konflik Suriah juga membuktikan bahwa pernyataan Presiden Obama terbukti salah, Obama menyatakan bahwa Rusia merupakan regional power, mengesampingkan peran Rusia di berbagai wilayah regional lain (Pakhomov, 2016).

Hal ini membuat Rusia bekerja untuk mendapatkan kembali statusnya sebagai kekuatan dunia dengan kemampuan proyeksi kekuatan serta sebagai 'pemain yang tidak dapat digantika' dalam konflik Timur Tengah serta dalam memecahkan masalah global. Tidak dapat diragukan lagi, konflik Timur Tengah sangat penting secara global, dan wilayah itu sendiri pernah menjadi medan pertempuran Perang Dingin bagi Uni Soviet dan AS. Memang, Rusia sedang berusaha untuk mendapatkan kembali posisinya di Timur Tengah. Selain itu, operasinya di Suriah diharapkan dapat mengalihkan perhatian komunitas global dan Rusia dari Ukraina dan dari krisis Ukraina. Efek yang mengganggu harus memfasilitasi pencabutan sanksi yang dikenakan pada Rusia serta mengakhiri isolasi internasional Rusia setelah aneksasi Krimea.

Selain itu Suriah adalah satu-satunya negara di dunia Arab yang memiliki sentimen anti-Amerika yang sama dengan Rusia. Sehingga bisa dikatakan bahwa Suriah adalah satu-satunya negara Arab yang secara terbuka menentang hegemoni Amerika. Hal ini membuat Kongres Amerika mengadopsi resolusi anti-Suriah yang menyebabkan retorika anti-Suriah di media Barat meningkat. Situasi itu mendorong Moskow dan Damaskus untuk saling mendekat. Sangat mungkin bahwa Rusia dapat mengizinkan aktor lain seperti UE dan China untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi dan kehidupan ekonomi Suriah pasca-konflik selama mereka mengakui supremasi politik Rusia. Moskow berusaha menyelamatkan rezim Bashar al Assad, sekutu terakhirnya di Timur Tengah, dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa Rusia memiliki kemampuan yang kuat dan terbukti untuk mempertahankan sekutunya dan bersedia untuk menghormati komitmen aliansi.

SIMPULAN

Intervensi Rusia berdasarkan kepada kepentingan pertahanan (militer), yaitu mempertahankan pangkalan udara Rusia yang ada di Suriah. Kepentingan ekonomi yaitu, kerjasama dalam perdagangan persenjataan Rusia dengan pemerintah

Suriah. Dan kepentingan ideologi yaitu untuk mempertahankan ideologinya yang ada di Suriah. Dukungan militer Rusia terhadap Suriah tidak hanya serangan udara, namun juga serangan oleh angkatan lautnya dengan menggunakan rudal. Sedangkan dukungan diplomatik Rusia terhadap Suriah ialah veto terhadap *draft* resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang ditujukan kepada pemerintah Suriah dan dukungan ekonomi berupa pinjaman uang dan layanan perbankan Rusia terhadap pemerintah Suriah. Sehingga hasil dari intervensi Rusia terhadap Suriah ini adalah berhasilnya Rusia dalam mempertahankan rezim pemerintahan Baashar Al-Assad dimana pihak opisisi hingga negara barat menginginkan baashar alssad mundur.

DAFTAR PUSTAKA

Noor, Ibrahim. (2014). Analisis Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional.* 2(4): 1063-1078.

Rachmat , Angga Nurdin. (2015). Kepentingan Nasional Rusia dalam Intervensi Militer di Suriah. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitik.* 6 (2): 181-189.

Yunus, Nur Ibrahim. (2017). Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan.* 1(8a): 71-72.

Indrajati, Yudhi. (2017). Intervensi Rusia ke Suriah Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 14(2): 45-60.

Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE publications..

Morgenthau, Hans J. 1991.. *Politik Antar Bangsa (Edisi 2).* Terjemahan A.M. Fatwan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Carlsnaes, Walter dkk. (2015) *Handbook Hubungan Internasiona.,* Bandung: Nusa Media.

Ashari, Khasan. (2015) *Kamus Hubungan Internasional.* Bandung: Nuansa Cendikia.

Masoed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodelogi.* Jakarta: LP3ES.

Ilnicki, Marek. (2015). On Russia's motives behind its military intervention in Syria. *Security and Defence Quarterly.* 9(4): 56–77.

Pakhomov, N. (2016). The Strategy Behind Russia's Moves in Syria. Retrieved from https://nationalinterest.org/feature/the-strategy-behind-russias-moves-syria-15497 pada tanggal 18 Oktober 2018.

Reuters. (2016, Desember 22). Russia Tested Over 160 New Weapons in Syrian Operation- Defense Minister. Retrieved, from Reuters Website: https://www.rt.com/news/371302-russian-military-annual-report/ diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

UN Security Council. (2011). Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russia Federation, China. Security Council 6627th Meeting. New York: UN Meetings Coverage & Press Releases. Retrieved from https://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm pada tanggal 17 Oktober 2020.

UN Security Council. (2012). Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League's Proposed Peace Plan. Security Council 6711th Meeting. New York: UN Meetings Coverage & Press Releases. Retrieved from https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm pada tanggal 17 Oktober 2020

UN Security Council. (2012). Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions, Due to Negative Votes of China, Russian Federation. New York: Meeting Coverage & Press Releases. Retrieved from https://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm pada tanggal 17 September 2020.